

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada penerapan prinsip *good governance*.

1. Pada indikator transparansi, Pemerintah Desa Kauman telah menyampaikan informasi pengelolaan Dana Desa melalui berbagai media, seperti baliho atau banner, papan informasi kegiatan, musyawarah desa, website resmi desa, media sosial, WhatsApp, serta penyampaian melalui RT dan RW. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi secara langsung dengan datang ke kantor desa. Namun, informasi mengenai tahapan pencairan Dana Desa secara rinci masih lebih banyak disampaikan kepada BPD dan pihak yang terlibat langsung, sehingga pemerataan informasi kepada seluruh masyarakat masih perlu ditingkatkan.
2. Pada indikator akuntabilitas, Pemerintah Desa Kauman telah melaksanakan pertanggungjawaban melalui penyusunan SPJ pada setiap kegiatan, pembagian tanggung jawab antara pengelola dan pelaksana kegiatan, serta monitoring dan evaluasi. Setiap penggunaan Dana Desa didukung dengan dokumen pertanggungjawaban dan diperiksa melalui pengawasan BPD

serta monitoring dan evaluasi dari pihak kecamatan. Meskipun demikian, ketelitian dalam kelengkapan administrasi masih perlu terus ditingkatkan.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kauman telah diterapkan dengan baik. Keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan Dana Desa, sedangkan mekanisme pertanggungjawaban memastikan bahwa penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Kauman diharapkan meningkatkan pemerataan penyampaian informasi mengenai seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa, tidak hanya mengenai penggunaan dan realisasi anggaran, tetapi juga proses pencairan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
2. Pemerintah desa perlu mempertahankan dan mengoptimalkan penggunaan berbagai media informasi, baik media konvensional maupun digital, agar informasi Dana Desa dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Pengelola Dana Desa dan pelaksana kegiatan diharapkan meningkatkan ketelitian dalam penyusunan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban agar administrasi pengelolaan Dana Desa semakin tertib dan konsisten.

4. BPD dan masyarakat diharapkan terus meningkatkan keterlibatan dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan secara berkelanjutan.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan mengkaji prinsip good governance lainnya atau melakukan penelitian pada lokasi yang berbeda sehingga diperoleh hasil yang lebih luas mengenai tata kelola pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2021). *Profil Kabupaten Bojonegoro 2021*. Bojonegoro, Indonesia: BPS Kabupaten Bojonegoro.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Cousins, B. L., & Earl, L. M. (1995). *Participatory Evaluation in Education: Studies in Evaluation*. Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Fifth). SAGE Publications Inc.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice Hall
- Dunn, W. N. (2004). *Public Policy Analysis: A Political Economy Approach*. Pearson Education.
- Dunn, W. N. (2018). *sixth edition: Public Policy Analysis an Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2011). *Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines*. Pearson Education.
- Kemendagri. (2024). *Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson Education.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. SAGE Publications Inc.
- OECD. (2019). *Digital Government Strategies for Transforming Public Services in the Welfare States*. Paris, France: OECD Publishing.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro.

Raadschelders, J. C. N. (2011). *Public Administration: The Interdisciplinary Study of Government*. Oxford University Press.

World Bank. (2023). *The Global Identification Challenge*. Washington, DC: World Bank Group

